

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi beberapa tahun belakangan tentang kejahatan terorisme yang semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*). Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Pengawasan kebijakan Negara untuk mengurangi dan memberantas pelaku teror dengan pemberian sanksi-sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Sesuai permasalahan yang dijelaskan, penulis tertarik melakukan peneliti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”.

Rumusan masalah tersebut akan memberikan tujuan penelitian sebagai berikut, pertama untuk mengetahui dan memahami lebih jauh untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi pemberlakuan UU nomor 5 tahun 2018. Kedua Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban terhadap perbuatan salah tangkap.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan tinjauan terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dimana terdapat unsur-unsur pencegahan yang diatur dalam Pasal 28, pasal 28A, pasal 31, pasal 31A, tentang proses penangkapan yang bertujuan menekan pergerakan-pergerakan terorisme yang semakin meningkat dan semakin nekat dalam melancarkan aksinya

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, UU Nomor 5 Tahun 2018, Tindak Pidana Terorisme

ABSTRACT

Problems that often occur in recent years about terrorism crimes that are increasingly developing in the midst of society, terrorism takes part in this nation's life to show another portrait of and among various types and types of crimes, especially violence, organized crime, and crime extraordinary (extraordinary crime). Terrorism is a crime against humanity and civilization and one of the serious threats to the sovereignty of each country. Escorting state policies to reduce and eradicate terrorists by providing criminal sanctions against perpetrators of terrorism. According to the problems described, the authors are interested in conducting a researcher entitled "Juridical Review of the Enactment of Law Number 5 Year 2018 concerning Amendments to Law Number 15 Year 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism as an Effort to Prevent Criminal Acts of Terrorism in Indonesia". From the formulation of the problem will provide the following research objectives, first to know and understand further To know and analyze the efficiency of the enactment of Law number 5 of 2018. Second To find out and understand the responsibility for wrongful arrests.

The formulation of the problem will provide the following research objectives, first to find out and understand further to know and analyze the efficiency of the enactment of Law number 5 of 2018. Second To find out and understand the responsibility for wrongful arrests.

The results of this study indicate that the presence of Law No. 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism where there are elements of prevention regulated in Article 28, Article 28A, Article 31, Article 31A, concerning arrest processes aimed at suppressing increasing terrorist movements and more determined in carrying out the action

Keywords: Juridical Review, Law Number 5 Year 2018, Crime of Terrorism

